BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produk hewan merupakan bahan yang berasal dari hewan masih segar atau telah diolah maupun diproses untuk keperluan konsumsi, atau kebutuhan lainnya. Menurut Pasal 1 ayat (5), Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/8/2016 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan menyatakan “Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia”. Daging termasuk dalam Produk Hewan merupakan salah satu komoditi peternakan yang menjadi andalan sumber protein hewani dan sangat menunjang untuk memenuhi kebutuhan dasar bahan pangan di Indonesia. Sebagian besar produksi daging adalah dari ternak, sumber – sumber ternak di dunia yaitu sapi, domba, babi, kambing, kerbau dan unggas.¹ Daging terbagi ke dalam dua jenis, yaitu daging ternak besar seperti sapi dan kerbau, maupun daging ternak kecil seperti domba, kambing, dan babi.² Kebutuhan pokok daging tidak semuanya dapat dicukupi oleh hasil produksi dalam negeri, guna memenuhi pasokan daging pemerintah pusat membuka kegiatan perdagangan daging secara impor dengan negara lain. Dalam kegiatannya perlu adanya pengawasan guna menghindari penyakit maupun kualitas produk hewan yang tidak layak konsumsi masuk ke Indonesia.

¹K.A. Buckle, R.A Edwards, G.H. Fleet, M. Wooton, Penerjemah Hari Purnomo dan Adiono, 1987, *Ilmu Pangan*, UI-Press, Jakarta. hlm 227

²Astawan, 2004, *Pentingnya Mengonsumsi daging*. <http://peternakantaurus.Wordpress.com/2010/07/26/pentingnya-mengonsumsi-daging>. Diakses pada 1 Mei 2018, pukul 10.26 WIB

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam melakukan di bidang perdagangan, pengawasan tersebut dilakukan oleh menteri. Menteri menunjuk petugas pengawas untuk melakukan pengawasan dibidang perdagangan. Petugas pengawas diberi wewenang yang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 100 Undang - undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi :

“Pelaksanaan pengawasan dibidang perdagangan mempunyai kewenangan:

1. Perizinan di bidang Perdagangan;
2. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;
3. Distribusi Barang dan/atau Jasa;
4. Pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan,keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
5. Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib;
6. Pendaftaran Gudang; dan
7. Penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.”

Jika petugas pengawas menemukan dugaan pelanggaran kegiatan dibidang Perdagangan dapat:

- a. Merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan Barang;
- b. Merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau
- c. Merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

Dalam hal melaksanakan pengawasan ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk ditindak lanjuti dan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Daging sapi termasuk hewan dan produk hewan yang kegiatan impornya dibatasi, demi menjaga kestabilan pasokan, maka setiap kegiatan Impor produk hewan, pelaku usaha diwajibkan memiliki perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas terkait, perizinan merupakan satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha, untuk mengemudikan tingkah laku para warga³. Impor barang maupun produk hewan hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki izin atau pengakuan berupa pengenal sebagai importir berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang – undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Menyatakan :

“Untuk kegiatan Ekspor Impor, Menteri mewajibkan Ekportir dan Importir untuk memiliki perizinan yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan dan/atau pengakuan.”

Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mengatur tentang pelanggaran yang tidak terpenuhinya izin dagang bagi pelaku usaha yaitu terdapat pada pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, menyatakan bahwa :

“Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pada 23 Januari 2017, telah terjadi perdagangan daging sapi impor tanpa izin di Pasar Aur Simpang Tarok, Bukittinggi. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Perdagangan Kota Bukittinggi, menerima laporan bahwa telah ditemukan daging sapi beku impor sejumlah 380 Kilogram tanpa izin. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan

³Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, hlm.2.

Perdagangan Kota Bukittinggi melakukan koordinasi dengan Polisi Resor Kota Bukittinggi untuk melakukan penyitaan daging sapi impor tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan adanya kasus impor produk hewan daging tanpa izin dagang khususnya di daerah Kota Bukittinggi Sumatera Barat, merupakan suatu hal yang menarik bagi penulis untuk dilakukan penelitian dengan karya tulis yang berjudul **“PERANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DAN PERDAGANGAN KOTA BUKITTINGGI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP IMPOR PRODUK HEWAN SAPI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DAGANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Perdagangan Kota Bukittinggi dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana impor produk hewan sapi yang tidak memiliki izin dagang?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang ditemui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Perdagangan Kota Bukittinggi dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana impor produk hewan sapi yang tidak memiliki izin dagang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Perdagangan Kota Bukittinggi dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana impor produk hewan sapi yang tidak memiliki izin dagang.
2. Untuk mengetahui kendala – kendala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Perdagangan Kota Bukittinggi dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana impor produk hewan sapi yang tidak memiliki izin dagang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*) yaitu suatu metode pendekatan hukum sebagai fenomena sosial, dimana peraturan dan teori yang ada dikemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang ada di masyarakat.⁴

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan bersumber dari 2 (dua) sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁵ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 4 (empat) orang pegawai dan pejabat Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Perdagangan Kota Bukittinggi, yaitu Bapak Alizar selaku Kepala Bidang Perdagangan, Bapak Herman, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Ibu Ratna Susanti, Selaku KASI Sarana Pengembangan Usaha Perdagangan dan Distribusi, dan Bapak Zukra selaku Penanggung Jawab Pasar Aur Kuning Bukittinggi yang berhubungan langsung dengan penyelesaian tindak pidana impor produk hewan di Kota

⁴Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.167

⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.31

Bukittinggi, dan 2 (Dua) orang pedagang produk hewan sapi di Pasar Aur Kuning Simpang Tarok, Bukittinggi yaitu Bapak Al dan Bapak Zal.

b. Data Sekunder

Dalam data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, surat-surat pribadi, dan sebagainya⁶ dan data sekunder diperoleh di kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perdagangan, mengenai data pelanggaran tidak memiliki izin perdagangan impor produk hewan pada tahun 2017 – 2018, serta data dari pedagang daging di Pasar Aur Simpang Tarok, Bukittinggi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tatap muka langsung dengan responden atau narasumber untuk menanyakan fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi dari responden dan bahkan saran-saran responden.⁷ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.⁸

⁶ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta hlm 14

⁷ *Ibid*, hlm.57

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.* hlm.214

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, berupa perundang – undangan, dokumen – dokumen, buku-buku, jurnal hukum dan kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁹

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif adalah uraian data secara permutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih, sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman analisis. Tergantung pada sifat data yang dikumpulkan, jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus – kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu klasifikasi, analisi yang dipakai adalah kualitatif.

⁹*Ibid*lm.86